
ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

Yohanis S. Ulimpa¹, Jullie J. Sondakh², Treesje Runtu³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115 Indonesia.

E-mail : malamoisarles@gmail.com

ABSTRACT

In line with regional autonomy that is oriented towards empowerment (empowerment) and community guidance in the implementation of clean authority and free of corruption, collusion and nepotism, the public sector is often regarded as a nest of wasteful efficiency and institutional fund leakage that always loses money. But the public sector still has wide opportunities to improve the performance of the benefits of resources economically, effectively and efficiently. Knowing the performance measurement of the Sorong Regency government. Knowing the role of indicators in the Sorong Regency government. The method used in this study is descriptive qualitative. The result is the performance measurement of the local government is carried out because of the provisions of the central government to make performance accountability reports for each government agency.

Keywords :Performance Measurement, Performance Indicator, LAKIP, Sorong District Government

1. PENDAHULUAN

Organisasi pemerintah adalah suatu institusi yang telah diberi kewenangan untuk mengurus kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk pada umumnya untuk mengelola aktivitas pelayanan terhadap seluruh masyarakat, sebagai institusi nirlaba, pemerintah bertujuan bukan untuk mendapat keuntungan, tetapi tujuannya untuk menyediakan pelayanan dan meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Pemerintahan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menjalankan mengurus (eksekutif), mengatur (legislatif), memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya dalam berbagai suatu kejadian atau kondisi pemerintahan, secara baik dan benar (Syafii 2011: 23). Adapun penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui analisis pengukuran kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Sorong di masa kemandirian daerah di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dan mengetahui peranan indikator kinerja dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi. Akuntansi menurut Suwardjono (2014:5) merupakan seni untuk mencatat, menggolongkan, dan meringkas suatu transaksi dan peristiwa mengenai keuangan dengan metode yang berguna dalam bentuk uang, dan menginterpretasikan suatu hasil dari proses tersebut. Sedangkan Sujarweni (2015:1) menyatakan akuntansi merupakan suatu peristiwa jasa yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan peristiwa atau suatu negosiasi perdagangan yang pada kemudian akan memberikan laporan mengenai finansial yang akan digunakan untuk parah bagian dalam mengambil ketetapan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan akuntansi merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang meliputi identifikasi dan pengukuran untuk pengambilan keputusan, pemrosesan data dan

pelaporan informasi, dan pengkomunikasian informasi yang digunakan oleh pengguna laporan.

Akuntansi Sektor Publik. Surjaweni (2015:1) menyatakan akuntansi sektor publik dapat merupakan suatu kegiatan jasa yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan suatu peristiwa negosiasi perdagangan yang akan mengeluarkan laporan mengenai keuangan yang diperlukan untuk parah golongan dalam mengambil suatu langkah untuk digunakan dalam mengelola dana publik di lembaga Negara dan di organisasi-organisasi dibawahnya.

Laporan Keuangan Daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan sebagai informasi yang mempunyai manfaat untuk para pengguna dalam menilai suatu akuntabilitas dan mengambil suatu keputusan ekonomi, social dan politik dalam menyediakan suatu informaasi. (Tanjung, 2012).

Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja. Kinerja yang dillaksanakan pada kegiatan yang bisa diukur dan akan memajukan pencapaian kinerja tersebut. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan secara berkelanjutan yang dapat memberikan umpan balik untuk usaha mempebaiki secara berkelanjutan dan pencapaian tujuan di waktu yang akan dating (Mardiasmo, 2002).

Aspek Yang Diukur Pada Pengukuran Kinerja. Pengukuran prestasi biasanya aspek yang dilaksanakan pada pengukuran prestasi yaitu : Aspek Finansial, kepuasan pelanggan, operasi dan paasar internal, kepuasan pegawai, kebahagiaan komunitas *Shareholder/ Stakeholder* dan waktu (Indra Bastian,2001).

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah di Era Otonomi. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang efesien, efektif dan akuntabel di era otonomi daerah, pemerintah telah mengeluarkan Inpres 1999 tentang setiap institusi pemerintah sebagai bagian pelaksana pemerintah negara sejak awal pimpinan Esalon II ke atas perlu menpertanggung jawabkan peran penting dan manfaatnya serta kekuasaan pengendalian sumber daya dan kebijakan yang sudah mengakui pada beralaskan perancangan strategi yang disusun pada ringkasan sebelumnya (LAN dan BPKP, 2000). Implekasi inpres nomor 7 tahun 1999 bagi perintah daerah tiap-tiap bidang kerja institusi pemerintah daerah diharuskan menerbitkan indikator prestasi sebagai bagian dari informasi akuntabilitas prestasi Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) bagi instansi pemerintah bersifat mandatori. Karena sifatnya mandatory, maka semua instansi pemerintah harus melakukannya dan dalam pelaksanaannya mengikuti pedoman yang dikeluarkan, dalam hal ini pedoman menyusun LAKIP yang telah dikeluarkan oleh lembaga adminitrasi negara.

Kerangka Pengukuran Kinerja Model LAKIP. Kerangka pengukuran kinerja model LAKIP terdiri atas dua bagian utama, yaitu penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian kinerja.

Tujuan Otonomi Daerah. Mengubah kesadaran masyarakat. Pembangunan satu daerah dapat disamakan oleh pemerintah daerah dengan daya dan ciri khas wilayah. Penerapan kemandirian wilayah adalah inti pusat yang utama pada bentuk masing-masing.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Bentuk penelitan merupakan penelitian secara mendalam untuk memberi gambaran dan perkembangan dari suatu objek dalam penelitian ini strategi yang dipergunakan melalui metode kualitatif yakni sumber dari deskriptif, Miles dan Huberman dalam (Silalahi, 2012).

Tempat dan Waktu Penelitian. Lokasi penelitian diKabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Tempatnya pada Kantor Bupati Kabupaten Sorong, yang beralamat di Jl. Sorong Klamono Kilo Meter 24 Kabupaten Sorong Papua Barat dan letaknya cukup strategis karena berada di Pinggiran Kota sehingga mudah di jangkau. Kabupaten Sorong merupakan sebuah

Kabupaten di Provinsi Papua Barat. Waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian kurang lebih 2 bulan mulai dari Juli hingga Agustus 2017.

Prosedur Penelitian. Langkah-langkah yang digunakan pada pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan permohonan penelitian
2. Disposisi pimpinan
3. Pengambilan data
4. Analisis data
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

Jenis Data. Bentuk data yang dipakai yaitu pada (Kuncoro 2009) merupakan : Kualitatif yakni data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian. Data kualitatif pada penelitian ini bermuat tentang posisi lembaga tempat penelitian.

Metode Analisis. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu desain kajian deskriptif, yakni desain pengkajian kasus sifatnya sia-sia menggambarkan, menilai suatu fakta dan kejadian.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Sorong terdiri dari :

1. Bupati
2. Wakil bupati
3. DPRD
4. Staf ahli bupati
5. Sekretariat daerah
6. Asisten sosial pemerintahan
7. Asisten pengembangan ekonomi
8. Asisten administrasi umum
9. Instansi vertikal BUMN dan BUMD
10. Distrik Distrik terdiri dari 32
11. Kelurahan Kelurahan terdiri dari 26 kelurahan
12. Badan daerah Badan daerah terdiri dari 7 badan daerah
13. Inspektorat
14. Sekretariat DPRD

Karakteristik Informan. Pada penelitian ini para informan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan para informan perempuan. Untuk lebih jelas dapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Informan (Orang)	Presentase
Laki-laki	8	53,33
Perempuan	7	46,66
Jumlah	15	100%

Sumber Data: Data Diolah 2017

Usia Informan. Berdasarkan data yang diperoleh, usia informan berkisar antara 31-57 tahun, komposisi usia informan dalam penelitian disajikan dalam Tabel 2. Tabel menunjukkan bahwa jumlah informan pada usia 31-40 tahun menunjukkan presentase yaitu sebanyak 5 (33,33%). Dan pada usia 40-57 tahun menunjukkan presentase yaitu sebanyak 10 (66,66%).

Tabel 2. Identifikasi Informan Berdasarkan Tingkat Usia

No.	Usia	Jumlah Informan (Orang)	Presentase
1	3-40	5	33,33
2	40-57	10	66,66
	Jumlah	15	100%

Sumber Data: Data Diolah 2017

Tingkat Pendidikan Informan. Peran pendidikan formal sangatlah penting dalam usaha peningkatan kualitas seseorang karena berguna dalam membangun serta peningkatan intelektual dan wawasan seseorang. Berdasarkan hasil penelitian ini tingkat pendidikan informan sangat bervariasi mulai dari Strata 1 (S1) sampai Strata 2 (S2). Komposisi tingkat pendidikan informan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Identifikasi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Informan (Orang)	Presentase
1	Strata 1 (S1)	4	26.6
2	Strata 2 (S2)	11	73.3
	Jumlah	15	100%

Sumber Data: Data Diolah 2017

Mengacu pada Peraturan Bupati Sorong Nomor 26 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016, maka sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Misi I terdapat 2 tujuan, 11 sasaran dan 13 indikator kinerja.
2. Misi II terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 4 indikator kinerja.
3. Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja

Tabel 4. Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran
1	Misi I	4	11	13	BS=-, B=13, C=-, K=-
2	Misi II	1	1	4	BS=-, B=4, C=-, K=-
3	Misi III	1	1	2	BS=-, B=2, C=-, K=-
	Jumlah	6	13	19	

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sorong

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap sasaran yang mencakup 15 indikator sasaran diketahui bahwa 15 indikator sasaran atau 100 % Baik. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 100%. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sorong pada tahun 2016 dengan kategori Baik. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

Misi I : 11 Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Presentase
1	Baik Sekali		
2	Baik	13	100
3	Cukup		
4	Kurang		
5	Nilai Belum Keluar		
Misi II : 4 Indikator Sasaran			
1	Baik Sekali		
2	Baik	4	100
3	Cukup		
4	Kurang		
	Jumlah		
Misi III : 2 Indikator Sasaran			
1	Baik Sekali		
2	Baik	2	100
3	Cukup	-	
4	Kurang	-	
	Jumlah		100

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sorong

4.2. Pembahasan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian%
Utama					
2	Ketersediaan rumah layak huni	Unit	20	20	20
			14	15	16
			62	166	75
			62	166	75
			100	100	100
			100	100	100
			100	100	100
Rata-rata kapaian kinerja					100 100 100

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sorong

Berdasarkan Tabel 6 diatas diketahui bahwa sasaran *Terlaksananya system pola pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru berbasis masyarakat*, diukur melalui pencapaian 1 indikator, 1 indikator sasaran mencapai target. Rata – rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2016 sebesar 100 %, dapat dipertahankan sama dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2015 sebesar 100 %.

Analisis Akuntabilitas Keuangan

1. Penerimaan

Penerimaan setelah pergantian sebesar Rp 230.000.000 setelah perubahan sebesar Rp 230.000.00

2. Belanja

Belanja sebelum perubahan sebesar Rp 301.945.009.000 setelah perubahan sebesar Rp 369.062.079.000 (Bertambah Rp 67.117.070.000)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Melalui hasil penelitian di lapangan, yang dapat disimpulkan adalah

- a. Analisis pengukuran prestasi pemerintah daerah dibuat berdasarkan petunjuk dari pemerintah pusat untuk membuat informasi akuntabilitas prestasi bagi setiap institusi pemerintah daerah.
- b. Model pengukuran kinerja pemerintah daerah di era otonomi daerah telah menggunakan indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *inpact*. Model ini sesuai dengan ketentuan dalam LAKIP. Tetapi terdapat kelemahan sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah pada saat ini yaitu pengukuran kinerja belum berfokus pada *outcome* akan tetapi masih berorientasi pada *output*. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah mampu menentukan indikator *outcome*, *benefit*, dan *inpact* secara tepat.

5.2. Saran

Melalui penelitian ini yang menjadi saran bagi peneliti adalah:

- a. Pemerintah daerah perlu membuat penambahan standar indikator cakupan, layanan kepuasan pelanggan, pencapaian tujuan dalam desain pengukuran kinerjanya dimana tidak hanya sebatas indikator *input*, *output*, *outcome* dan *inpact*
- b. Indikator kinerja bersama laporan kinerja perlu dipublikasikan kepada masyarakat agar publik bisa mengakses informasi kinerja pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi sektor Publik di Indonesia*, Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Madah
- Badan Kesekretariatan Daerah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.
- Halim, Abdula dan Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Empat* Penerbit: Erlangga, Jakarta
- Hery. 2012. *Cara mudah memahami Akuntansi (Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi)*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Suwardjono, 2014. *Teori Akuntansi Perekayasa Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*.
- Surjaweni, 2015. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*
- Tanjung, Abdul Hafis. 2012. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Penerbit: Alfabeta, Bandung.
- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP (2000) *Akutabilitas dan Good Governance, Model Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Miles dan Huberman dalam (Silalahi, 2012:284)